

KAWAL PPDB, OMBUDSMAN JALIN KOORDINASI DENGAN PEMDA

Selasa, 25 Mei 2021 - Yohanis Tri Christyanto Kora

MANOKWARI, PB News Â- Kepala Ombudsman Perwakilan Papua Barat Musa Yoseph Sombuk mengatakan, koordinasi dengan pemerintah daerah setempat telah dilakukan untuk mengoptimalkan pengawasan seluruh tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2020/2021.

Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya gejolak yang timbul seperti tahun sebelumnya.

"Kami sudah koordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Biro Hukum Setda Papua Barat," ujar Musa Sombuk kepada Papua Barat News, Sabtu pekan lalu (22/5/2021).

"Kami juga mengundang Kominfo, Dinas Sosial dan Polda Papua Barat sebagai sektor pendukung. Tapi mereka tidak sempat hadir," ujar dia.

Dalam rapat itu, Ombudsman menyampaikan sejumlah catatan dari hasil monitoring tahun sebelumnya dan memberi penekanan pada hal yang perlu diperhatikan. Seperti adanya regulasi di level provinsi dalam menterjemahkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2021.

Sebab, hingga kini belum ada regulasi di tingkat provinsi dalam mengatur pola pelaksanaan PPDB. Sehingga, Ombudsman mendorong Biro Hukum Setda Papua Barat untuk segera merumuskan regulasi yang dijadikan patokan dalam penyelenggaraan di lapangan nantinya.

"Regulasi menjadi rujukan hukum dari dinas dan satuan pendidikan dalam menjalankan PPDB," ujarnya.

Regulasi tersebut, sambung Musa, memberikan penguatan terhadap proses PPDB dan mampu mencegah kemungkinan bagi masyarakat dalam menggunakan hak mereka untuk menggugat.

"Ini juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam melakukan upaya-upaya fasilitasi," kata dia.

Musa menuturkan, dari hasil pertemuan itu juga didapatkan bahwa Dinas Pendidikan sudah lebih siap dalam menjalankan PPDB tahun 2021. Kesiapan tersebut didasarkan pada pengalaman penyelenggaraan PPDB 2020, yang juga dilaksanakan dalam masa pandemi.

"Berdasarkan saran dari Ombudsman tahun lalu, mereka sudah menyiapkan pedoman teknis terkait PPDB tahun ini," kata dia.

Pedoman teknis tersebut, kata Musa, berkaitan dengan komitmen ditiadakan pungutan biaya di luar pendaftaran yang diambil dari calon peserta didik.

"Itu tertuang di pedoman teknis yang mereka susun yang sudah disampaikan kepada kami," pungkasnya. (PB25)